

JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.2 : 306 – 328

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>**ANALISIS BIBLIOMETRIK PERKEMBANGAN PENELITIAN
DIGITAL GOVERNANCE****Ryan Anggria Pratama^{1*} & Azhari Setiawan²**¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Abstract: *Digital governance has been the subject of research in its evolution. Governments can use digital technology to enable citizens to participate in policy discussions, increase accountability, and improve democratic practices in government. Digital governance is increasingly receiving research attention because it involves managing and using digital technology in government practices. The database used in this research is the Scopus database. The keywords used in writing this scientific article are TITLE-ABS-KEY ("digital governance"). The years used in this article selection were from 2006 to March 2024. Next, inclusion and exclusion criteria were determined to select which articles would be analyzed. After the article has been screened, the next step is to enter the CSV data into the R Studio application. A total of 340 journal articles were published from 2006 to March 2024. This research found that the most published trends were carried out in 2023, with 103 articles and six citations in 2015. Then, second place was in 2017 with five citations, and third place was in 2018 with four citations. Research on digital governance has enormous potential that can be developed further. Areas explored in this research include cyber security, integrating the latest technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, and cloud computing into government systems, utilising big data to support better decision-making, and increasing public participation and government transparency through digital platforms. This research provides a comprehensive analysis of trends in digital governance research, particularly highlighting the increasing attention it has received in recent years. For future research, it would be valuable to explore the long-term impacts of digital governance initiatives on public trust and policy outcomes. Additionally, investigating the challenges and barriers to implementing advanced technologies in different governmental contexts could further enrich the understanding of digital governance's potential and limitations.*

Keywords: *digital governance; governance; bibliometric analysis.*

Abstrak: *Tata kelola digital telah menjadi subjek penelitian dalam evolusinya. Pemerintah dapat menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan warga berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan praktik demokrasi dalam pemerintahan. Tata kelola digital semakin mendapat perhatian penelitian karena melibatkan pengelolaan dan penggunaan teknologi digital dalam praktik pemerintahan. Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis data Scopus. Kata kunci yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah TITLE-ABS-KEY ("tata kelola digital"). Tahun yang digunakan dalam pemilihan artikel ini adalah dari tahun 2006 hingga Maret 2024. Selanjutnya ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih artikel mana yang akan dianalisis. Setelah artikel disaring, langkah selanjutnya adalah memasukkan data CSV ke dalam aplikasi R Studio. Sebanyak 340 artikel jurnal diterbitkan pada tahun 2006 hingga Maret 2024. Penelitian ini menemukan tren publikasi terbanyak dilakukan pada tahun 2023, yakni sebanyak 103 artikel dan enam sitasi pada tahun 2015. Kemudian, tempat kedua adalah pada 2017 dengan lima kutipan, dan tempat ketiga adalah pada 2018 dengan empat kutipan. Penelitian mengenai tata kelola digital (Digital Governance) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Bidang-bidang yang dieksplorasi dalam penelitian ini mencakup keamanan siber, mengintegrasikan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan komputasi awan ke dalam sistem pemerintahan,*

* Corresponding Author: ryananggria@umrah.ac.id

Article History :

Received : (16052023)

Revised : (01092024; 06092024)

Accepted : (29092024)

memanfaatkan big data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi publik dan transparansi pemerintah melalui platform digital. Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif tentang tren dalam penelitian tata kelola digital, khususnya menyoroti meningkatnya perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang inisiatif tata kelola digital terhadap kepercayaan publik dan hasil kebijakan. Selain itu prospek penelitian ke depan dapat mengkaji tantangan dan hambatan penerapan teknologi terbaru untuk memperkaya pemahaman tentang potensi dan keterbatasan dari tata kelola digital.

Kata Kunci : digital governance; governance; analisis bibliometrik.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



PENDAHULUAN

Digital Governance yang melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional pemerintahan, semakin mendapat perhatian penelitian. Penelitian telah mengeksplorasi berbagai aspek tata kelola, termasuk akuntabilitas, keadilan, desentralisasi, transparansi, profesionalisme, dan daya tanggap (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018). Tata kelola pemerintahan digital mengacu pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan pemberian layanan, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses tata kelola.

Evolusi *Digital Governance*, *E-Governance*, atau tata pemerintahan digital telah menjadi subjek penelitian dan analisis ekstensif selama bertahun-tahun. Para ahli telah menyelidiki berbagai aspek evolusi ini, dengan tujuan untuk memahami perkembangan, dampak, dan arah masa depan. Salah satu bidang fokus utama adalah tahapan pengembangan *e-Government*. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi berbagai tahapan seperti *e-Government*, *e-governance*, dan *e-democracy*, yang masing-masing mewakili fase pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat, menyediakan layanan, dan meningkatkan transparansi (García-Sánchez, Rodríguez-Domínguez, & Frías-Aceituno, 2013). Tahapan ini sangat penting untuk memahami bagaimana *Digital Governance* telah berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana *Digital Governance* telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan konstituennya.

Pergeseran menuju transformasi digital ini menandakan perubahan mendasar dalam cara pemerintah berfungsi dan memberikan nilai kepada masyarakat di era digital. Selain itu, peran partisipasi elektronik dalam membentuk *Digital Governance* juga telah ditekankan. Inisiatif seperti forum online, platform konsultasi, dan portal *crowdsourcing* berpotensi meningkatkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan (Lember, 2022).

Dengan memanfaatkan alat partisipasi elektronik, pemerintah dapat mendorong transparansi, inklusivitas, dan pengambilan keputusan yang demokratis. Secara keseluruhan, penelitian mengenai *Digital Governance/E-Governance* mencerminkan eksplorasi multidimensi terhadap evolusi pemerintahan di era digital. Mulai dari mengkaji tahapan perkembangan dan penilaian kematangan hingga penerapan transformasi digital dan mendorong keterlibatan masyarakat, serta para peneliti telah memberikan wawasan berharga tentang *Digital Governance* di masa lalu, saat ini, dan masa depan.

Melalui penggunaan teknologi digital, pemerintah dapat memberdayakan warga negaranya untuk berkontribusi dalam diskusi kebijakan, mendorong akuntabilitas, dan mendorong praktik demokrasi dalam pemerintahan. Singkatnya, penelitian mengenai *Digital Governance* menawarkan wawasan berharga mengenai hubungan rumit antara teknologi, struktur tata kelola, keterlibatan masyarakat, dan kerangka kelembagaan. Para peneliti bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan proses tata kelola dan mendorong pengambilan keputusan yang inklusif.

Analisis bibliometrik muncul sebagai instrumen penting dalam memahami lanskap tumbuh-kembang sebuah bangunan literatur dan penelitian. Model kajian bibliometrik ini memungkinkan peneliti untuk menilai secara kuantitatif pertumbuhan, tren, dan dampak karya ilmiah di suatu bidang. Analisis bibliometrik terkait dengan *digital governance* cukup banyak telah dilakukan dan terbukti signifikan mengiringi perkembangan studi tata kelola pemerintahan baik secara praktik dan teoritik. Shenkoya (2022) misalnya, melakukan analisis bibliometrik untuk menggali dampak positif transformasi digital terhadap tata kelola pemerintahan (*digital governance*). Liu (2022) dan Urbanovics (2022) kemudian menyelidiki bagaimana kemajuan, tren, dan evolusi dalam penelitian *e-government* selama satu dekade terakhir dalam menggambarkan dinamisnya studi tentang *digital governance*.

Adapun kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan studi literatur terhadap artikel yang berkaitan dengan perkembangan penelitian tentang Tata Kelola Pemerintahan digital (*Digital Governance*) dengan menggunakan artikel-artikel yang memiliki relevansi langsung terhadap perkembangan dan pengembangan studi *digital governance* untuk konteks Indonesia terutama pada lokus daerah pesisir kepulauan yang belum disentuh oleh kajian-kajian sejenis sebelumnya. Dalam analisis bibliometrik ini, terdapat beberapa aspek penting yang dapat diungkapkan. Pertama, analisis bibliometrik dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan literatur terkait, seperti jumlah publikasi, subyek artikel, pendekatan penelitian yang digunakan, dan produktivitas pengarang (Mubarrok & Rahmawati, 2020). Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna untuk kemungkinan penelitian selanjutnya dalam bidang *digital governance* (Herdianto, Windyaningrum, Masruroh, & Setiawan, 2021).

Analisis bibliometrik adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis data bibliografi yang diambil dari studi penelitian untuk mengidentifikasi pola dan tren penerbitan dalam domain pengetahuan tertentu (Chen, 2023). Ini melibatkan analisis matematis dan statistik buku, artikel, atau jenis karya lain yang diterbitkan untuk memberikan wawasan tentang hasil penelitian di seluruh dunia (Larivière, Ni, Gingras, Cronin, & Sugimoto, 2013). Metode ini memungkinkan pemeriksaan area penelitian, tren utama, dan metodologi yang ditempuh oleh peneliti, memberikan gambaran komprehensif tentang serangkaian dokumen (S. Kumar, Sureka, & Pandey, 2020). Selain itu, bibliometrik dapat digunakan untuk menetapkan profil publikasi pada topik tertentu, mengidentifikasi aspek struktural dan tren dalam suatu disiplin, dan menentukan perubahan kualitatif dan kuantitatif dalam subjek penelitian ilmiah (Baier-Fuentes, Merigó, Amorós, & Gaviria-Marín, 2018).

Analisis bibliometrik mencakup perhitungan jaringan bibliometrik untuk menggambarkan afiliasi atau kesamaan entitas bibliometrik, seperti penulis, dan mengelompokkannya ke dalam kelompok yang mewakili sub-area atau komunitas (Kammerer, Göster, Reichert, & Pryss, 2021). Ini adalah alat yang berharga untuk melakukan analisis kutipan dan mempelajari konten bibliografi artikel yang diterbitkan dalam jurnal dan karya ilmiah lainnya (Ananda & Nandiyanto, 2022). Dengan memanfaatkan indikator bibliometrik, peneliti dapat mengidentifikasi tren dan tema utama dalam jurnal, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi bidang penelitian (Kammerer et al., 2021). Selanjutnya, bibliometrik dapat digunakan untuk membangun peta berbasis jarak, memvisualisasikan jaringan kolaborasi, dan menganalisis karakteristik statistik dari dokumen yang dikumpulkan (Xue et al., 2021).

Artikel ini menggunakan analisis bibliometrik untuk menjawab sejumlah pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana Digital Governance hadir dalam trajektori literatur dari segi tren publikasi per tahun?
2. Sejauh mana Digital Governance menjadi topik yang relevan dalam perkembangan literatur, terutama melalui analisis sitasi per tahun?

3. Siapa saja penulis, sumber, dan afiliasi yang signifikan dalam kajian Digital Governance, dan bagaimana topik ini menjadi rujukan utama?
4. Topik dan tema apa saja yang secara langsung terasosiasi dengan Digital Governance, baik yang paling relevan hingga yang kurang relevan, berdasarkan analisis word cloud dan three-field plot?
5. Bagaimana derajat densitas dan sentralitas topik-topik terkait Digital Governance terdistribusi, dan topik mana yang dianggap relevan, 'naik daun', penggerak utama, atau sudah ditinggalkan dalam penelitian terkini?

Dengan demikian, melalui analisis bibliometrik, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan penelitian *Digital Governance* dalam ranah sosial, serta mengidentifikasi arah penelitian yang mungkin untuk dieksplorasi lebih lanjut. Referensi yang relevan dan berkualitas sangat penting dalam analisis bibliometrik yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan di bidang ini.

METODOLOGI

Analisis bibliometrik memainkan peran penting dalam metodologi evaluasi penelitian, menawarkan pendekatan sistematis untuk memahami pola penerbitan, tren penelitian, dan dampak produksi ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan memanfaatkan alat dan teknik bibliometrik, peneliti dapat memperoleh wawasan berharga tentang evolusi bidang penelitian, jaringan kolaborasi, dan penyebaran pengetahuan di berbagai domain.

Adapun database yang digunakan dalam penelitian ini adalah database scopus yang merupakan database dalam navigasi yang mengindeks abstrak dan sitasi jurnal ilmiah yang terbesar didunia. Kata kunci yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah *TITLE-ABS-KEY* ("*digital governance*"). Adapun dalam pemilihan tahun yang digunakan dalam penjaringan artikel ini dari tahun 2006 sampai dengan bulan maret pada tahun 2024. Selanjutnya, bukan hanya pemilihan kata kunci yang dilakukan, akan tetapi juga dilakukan penentuan kriteria inklusi dan eksklusi dalam menyeleksi artikel mana saja yang akan dianalisis. Setelah dilakukan penjaringan artikel, maka tahap berikutnya memasukkan data csv ke dalam aplikasi R Studio.

Dalam proses penelitian ini, tahapan pertama adalah *literature review* yang bertujuan untuk memahami perkembangan keilmuan yang ada serta merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Tahap kedua melibatkan pemilihan sampel, di mana data bibliometrik dari literatur yang akan dianalisis diunduh dan disadur untuk proses lebih lanjut. Pada tahap ketiga, dilakukan analisis data bibliometrik yang mencakup produksi literatur, relevansi, serta analisis tema atau topik dengan metode *co-occurrence analysis*. Terakhir, hasil dari analisis data dipaparkan dan diikuti dengan diskusi mendalam terkait temuan yang diperoleh dari analisis tersebut.

Untuk memfokuskan pelaksanaan analisis, kami menggunakan metode PRISMA (lihat tabel 1) untuk menjelaskan bagaimana proses pengumpulan, pemilihan, dan pemilahan data bibliometrik yang digunakan dalam analisis bibliometrik. Pada awal pencarian kata kunci "*digital governance*" di database Scopus, kami menemukan total 776 artikel dari tahun 2006 sampai dengan 2024. Setelah itu kami melakukan dua tingkat pemilihan dan pemilihan secara bidang ilmu dan jenis artikel yang diulas. Secara bidang ilmu kami memfokuskan ekstraksi data pada bidang Ilmu Sosial. Kemudian secara jenis artikel kami memfokuskan pada tulisan berkala ilmiah/jurnal saja. Pemilihan dan pemilihan data bibliometrik menghasilkan dataset final dengan jumlah catatan sebanyak 340 artikel jurnal yang diulas dalam analisis bibliometrik.

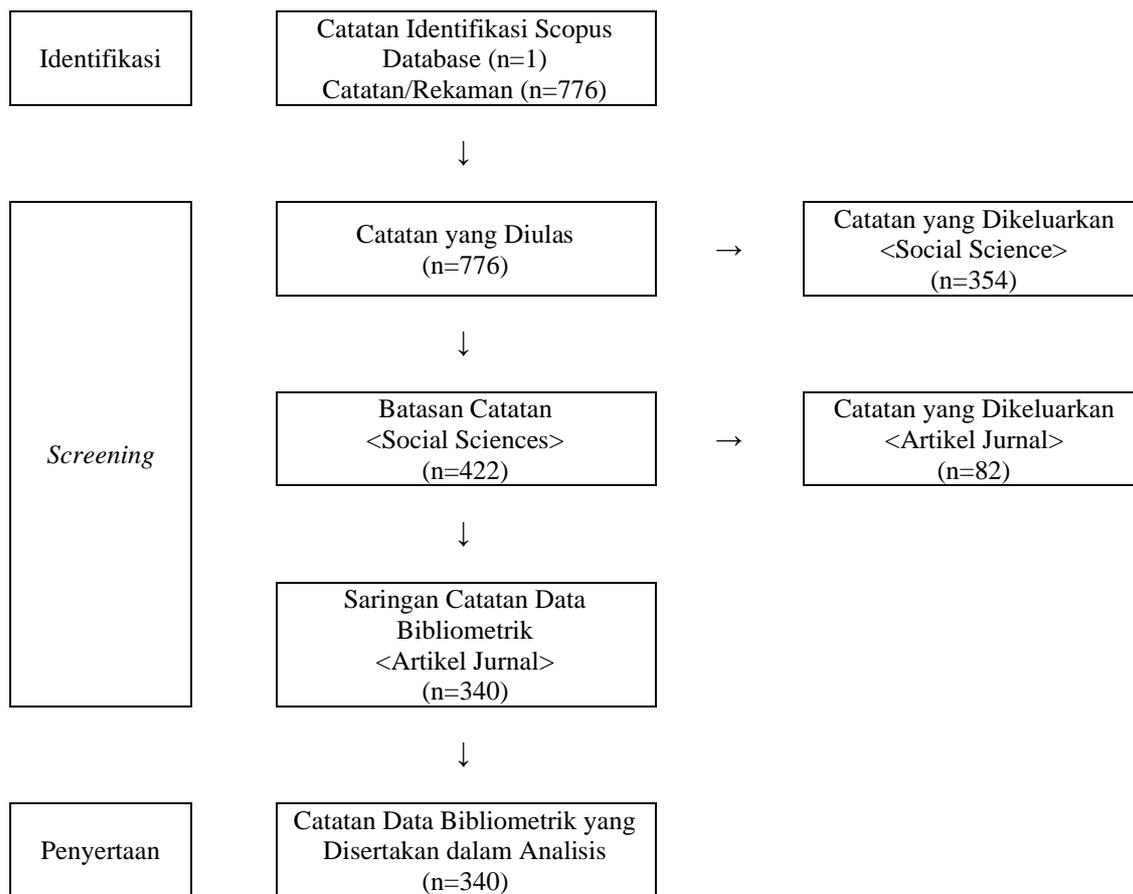


Diagram 1. Proses Pemilihan dan Pemilahan Sampel Data Bibliometrik dengan Metode PRISMA

Bibliometrik dapat dilakukan menggunakan berbagai alat dan perangkat lunak, seperti Biblioshiny di R-Studio, yang memungkinkan analisis bibliometrik tingkat lanjut untuk menentukan dinamika publikasi, jurnal berpengaruh, penulis berpengaruh, dan hubungan antar negara, kata kunci, dan jurnal (Boğa-Avrar, 2024). Dengan memanfaatkan Biblioshiny, peneliti dapat melakukan analisis bibliometrik untuk mengkategorikan dan mengevaluasi kontribusi penulis, negara, dan jurnal (Kawuki, Yu, & Musa, 2020). Perangkat lunak ini memfasilitasi visualisasi pemetaan bibliometrik dan kekuatan keterkaitan antar konstituen, membantu analisis pola penelitian dan wawasan untuk penelitian masa depan.

Singkatnya, bibliometrik, jika digabungkan dengan alat seperti Biblioshiny di R-Studio, menawarkan kepada peneliti cara yang ampuh untuk menganalisis dan memvisualisasikan literatur secara kuantitatif, mengidentifikasi tren penelitian, dan menilai dampak dan produktivitas karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu.

Kami melakukan analisis bibliometrik pada 340 total artikel/dokumen yang dipublikasi dari rentang waktu tahun 2006 sampai dengan 2024. 340 artikel tersebut berasal dari 259 sumber. Tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 21.64%, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Usia rata-rata dokumen adalah 2.97 tahun, dengan rata-rata sitasi per dokumen sebesar 10.38, mengindikasikan dampak yang relatif tinggi dalam literatur akademis. Meskipun tidak ada informasi tentang jumlah referensi, data mencakup 883 kata kunci tambahan dan 1190 kata kunci penulis, memberikan wawasan tentang topik-topik yang terkait dengan materi yang dianalisis. Terdapat 801 penulis yang terlibat, dengan 94 di antaranya adalah penulis tunggal, dan rata-rata kolaborasi penulis per dokumen adalah 2.6.

Persentase kolaborasi internasional adalah 22.65%, menunjukkan kerja sama lintas batas yang signifikan. Seluruh 340 dokumen dalam data tersebut adalah artikel, menyoroti bahwa fokus utama data adalah pada artikel jurnal. Dengan demikian, analisis bibliometrik memberikan gambaran yang kaya dan komprehensif tentang literatur akademis yang relevan dengan topik tersebut.

Tabel 1. Informasi Utama Data Bibliometrik

Deskripsi	Hasil
Main Information About Data	
Timespan	2006:2024
Sources (Journals, Books, etc)	259
Documents	340
Annual Growth Rate %	21.64
Document Average Age	2.97
Average citations per doc	10.38
References	0
Document Contents	
Keywords Plus (ID)	883
Author's Keywords (DE)	1190
Authors	
Authors	801
Authors of single-authored docs	94
Authors Collaboration	
Single-authored docs	100
Co-Authors per Doc	2.6
International co-authorships %	22.65
Document Types	
Journal Article	340

Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

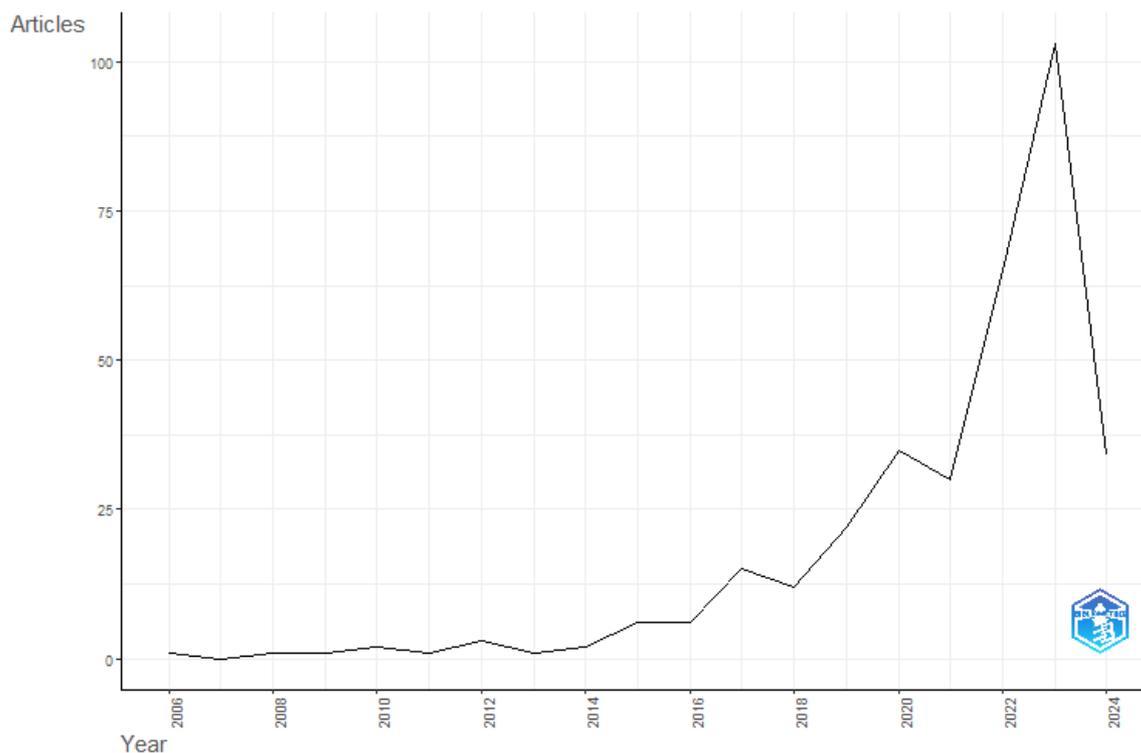
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis bibliometrik yang telah dilakukan menjawab lima pertanyaan utama dalam analisis kepustakaan. Pertama, kami menjelaskan bagaimana *Digital Governance* eksis dalam trajektori literatur dalam konteks tren publikasi melalui analisis produksi artikel per tahun. Kedua, sejauh mana *digital governance* menjadi bahasan yang relevan dalam trajektori perkembangannya melalui analisis sitasi per tahun. Ketiga, kami menelisik penulis, sumber, dan afiliasi yang relevan dan signifikan dalam kajian *digital governance* untuk mengeksplorasi bagaimana topik dan/atau tema ini menjadi rujukan. Keempat, kami melakukan analisis topik dan tematik untuk menggali topik-topik dan tema-tema apa saja yang terasosiasi secara langsung dari derajat relevansi dan sentral yang paling dekat dan yang terjauh berkaitan dengan *digital governance* melalui analisis *word cloud* dan *three-field plot*. Kelima, kami melakukan analisis tematik berdasarkan derajat densitas dan sentralitas topik-topik terkait dengan *digital governance* dengan menghasilkan empat kuadran untuk melihat topik mana yang relevan, 'naik daun', tema penggerak, dan tema-tema yang telah ditinggalkan dalam penelitian terkait.

Eksistensi 'Digital Governance': Tren Publikasi

Hasil analisis terhadap 340 artikel jurnal menghasilkan data yang beragam dan bervariasi. Tema hasil penelitian "*Digital Governance*" yang dihasilkan sejak 2006 hingga

2024 sangat bervariasi dari berbagai sudut. Penelitian ini menganalisis dan mengklasifikasikan data berdasarkan dokumen tahunan, kutipan dokumen, penulis, afiliasi kampus, sumber jurnal, dokumen, jenis, bidang studi, dan negara yang mendominasi penelitian dalam rentang tersebut. Perkembangan jumlah artikel jurnal mengalami fluktuasi walaupun pada trennya meningkat dari tahun 2006 hingga maret 2024. Meskipun dapat kita lihat pada grafik 1 terjadi ketiadaan artikel pada tahun 2007 dan penurunan produktifitas ditahun 2011, 2013, 2018. Ditahun 2024 telah terbit 34 artikel dan potensi meningkat sangat besar jika melihat perkembangan grafik di gambar tersebut. Untuk publikasi yang tertinggi terlihat pada tahun 2023 dimana jumlah artikel yang terpublikasi sebanyak 103 artikel.



Grafik 1. Produksi Artikel per Tahun

Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

Perkembangan produksi artikel bertema *Digital Governance* mengalami pertumbuhan dan evolusi yang signifikan dari waktu ke waktu. Studi seperti yang dilakukan oleh Alvarega (Alvarenga, Matos, Godina, & Matias, 2020) dan Hasanah (Hasanah, Pratama, Rahmat, & Kurniawan, 2023) telah menyelidiki evolusi literatur pemerintahan digital, menganalisis aspek transformasi digital di sektor publik, dan memetakan fitur-fitur penting di lapangan. Frekuensi publikasi artikel di bidang ini menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya seperti pada tahun 2020, yang menunjukkan meningkatnya minat dan aktivitas penelitian terhadap *Digital Governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Demuyakor (Demuyakor, 2021) menyoroti bahwa semakin banyak negara maju yang telah terlibat dalam inisiatif *Digital Governance* selama hampir dua dekade, hal ini menunjukkan adanya minat dan investasi yang sudah lama ada di bidang ini. Selain itu, penelitian seperti yang dilakukan oleh Belanger & Carter (Belanger & Carter, 2012) telah memberikan wawasan mengenai metamorfosis penelitian *e-Government* dari waktu ke waktu, sehingga memberikan dasar bagi rekomendasi penelitian di masa depan mengenai fenomena global ini.

Lebih jauh lagi, peralihan dari pendekatan 'manajemen publik baru' ke 'tata kelola era digital' sebagaimana dibahas oleh Margetts & Dunleavy (Margetts & Dunleavy, 2013) menandakan adanya perubahan dalam perangkat reformasi manajemen publik, yang menekankan pada layanan holistik dan perubahan digital menyeluruh dalam administrasi. Pergeseran ini mencerminkan perubahan lanskap praktik *Digital Governance* menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan berpusat pada masyarakat.

Perkembangan produksi artikel dengan tema *Digital Governance* telah mengalami kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu, dengan semakin banyaknya literatur yang mengeksplorasi berbagai aspek transformasi digital, manajemen pengetahuan, *e-Government*, dan tantangan tata kelola. Peralihan ke arah praktik *Digital Governance* yang lebih komprehensif dan berfokus pada masyarakat menunjukkan adanya bidang yang semakin matang dengan relevansi dan dampak yang semakin meningkat terhadap operasional sektor publik.

Perkembangan produksi artikel dengan tema Digital Governance yang semakin eksploratif juga mencerminkan adanya upaya untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh sektor publik. Dengan semakin banyaknya literatur yang mengeksplorasi berbagai aspek seperti transformasi digital, manajemen pengetahuan, *e-Government*, dan tantangan tata kelola, terlihat bahwa penelitian ini semakin relevan dan berdampak besar terhadap operasional sektor publik. Pengembangan literatur ini menunjukkan bahwa Digital Governance telah bergerak dari sekadar digitalisasi proses pemerintahan menuju adopsi yang lebih luas dari prinsip-prinsip tata kelola digital yang mencakup inklusivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Seiring dengan semakin matangnya bidang ini, penelitian di masa depan diharapkan dapat terus mendorong inovasi dalam tata kelola digital, dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan nilai publik yang lebih besar dan meningkatkan kualitas demokrasi di era digital.

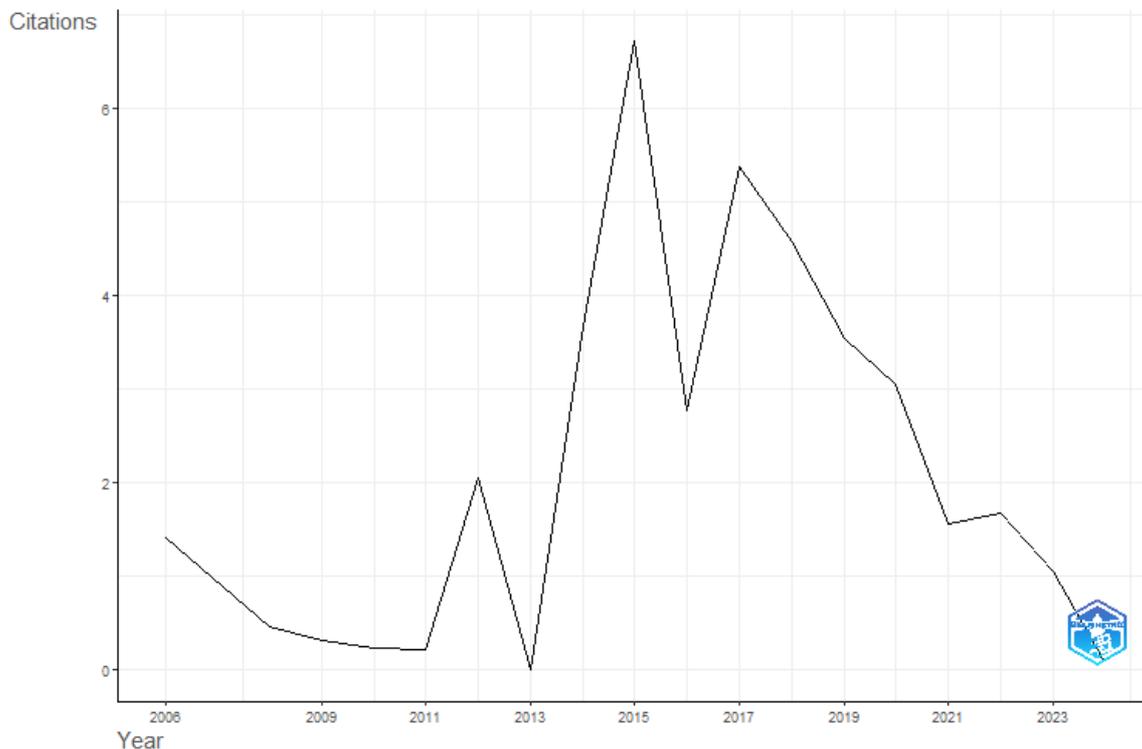
Relevansi Digital Governance: Sitasi per Tahun

Selanjutnya dari grafik grafik 2 dibawah ini terlihat dokumen jurnal dengan sitasi tinggi diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 6 sitasi. Kemudian yang menduduki peringkat kedua adalah tahun 2017 sebanyak 5 sitasi dan yang ketiga adalah pada tahun 2018 sebanyak 4 sitasi. Hasil analisis sitasi menunjukkan bahwa kajian mengenai *Digital Governance* cukup relevan utamanya pada rentang waktu 2013 s.d. 2017.

Berkaitan dengan relevansi tersebut, *Digital Governance* menjadi sangat penting dalam konteks saat ini karena dampaknya terhadap berbagai aspek masyarakat dan tata kelola. Pentingnya *Digital Governance* terlihat dari perlunya organisasi sektor publik beradaptasi terhadap disrupsi dan transformasi digital, seperti yang disoroti oleh Magnusson (Magnusson, Khisro, Björnses, & Ivarsson, 2020). Adaptasi ini memerlukan penanganan perubahan yang tidak berkelanjutan dan mengeksplorasi opsi digital baru dengan cepat dan hemat biaya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Addo & Senyo (Addo & Senyo, 2020) menekankan peran digitalisasi dalam memerangi korupsi pemerintah di negara-negara berkembang, yang menunjukkan pentingnya peran *Digital Governance* dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, pentingnya *Digital Governance* juga terlihat dari potensinya untuk menjembatani kesenjangan digital. Mengatasi permasalahan kesenjangan digital melalui kebijakan dan inisiatif yang relevan sangat penting untuk memastikan akses inklusif terhadap teknologi dan layanan digital. Selanjutnya penelitian Viale (Viale, Gendron, & Suddaby, 2017) menyoroti bagaimana keahlian pengukuran digital telah mendapatkan legitimasi di dalam lembaga-lembaga, menunjukkan lanskap praktik tata kelola yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh kemajuan digital.

Selain itu, pentingnya *Digital Governance* dalam meningkatkan penyediaan layanan publik terbukti dalam penelitian seperti Osifo (Osifo, 2018), yang mengeksplorasi keberhasilan dan tantangan pemerintahan digital dalam kaitannya dengan penyampaian layanan publik. Dengan berfokus pada strategi kebijakan, implementasi, dan inovasi, *Digital Governance* dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas penyampaian layanan publik.



Grafik 2. Rata-Rata Sitasi per Tahun

Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

Relevansi *Digital Governance* memiliki banyak aspek, mencakup berbagai bidang seperti pemberantasan korupsi, menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan pemberian layanan, dan mendorong transparansi. Ketika teknologi digital terus membentuk praktik tata kelola secara global, pemahaman dan pemanfaatan prinsip-prinsip *Digital Governance* sangatlah penting untuk mendorong sistem tata kelola yang inklusif, efisien, dan akuntabel.

Rujukan Digital Governance: Penulis, Sumber, dan Afiliasi yang Relevan

Grafik 3 menunjukkan bahwa *Sustainability* dari Swiss merupakan sumber yang paling banyak mempublikasi artikel tentang *Digital Governance*. Selanjutnya, sumber yang relevan adalah *Government Information Quarterly*, *Big Data and Society*, *Information*, dan *Information Polity*.

Analisis bibliometrik berdasarkan sumber tulisan mengungkapkan informasi yang relevan tentang distribusi artikel dari berbagai jurnal atau sumber publikasi. Dalam analisis ini, jurnal "*Sustainability*" dari Swiss menonjol sebagai sumber dengan jumlah artikel tertinggi, yaitu 13 artikel. Ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dari jurnal tersebut terhadap literatur akademis yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Selanjutnya, "*Government Information Quarterly*" memiliki 5 artikel, menunjukkan peran penting jurnal ini dalam menyediakan wawasan terkait dengan aspek pemerintahan informasi. Jurnal "*Big Data and Society*", "*Information*" (Swiss), dan "*Information Polity*" masing-masing menyumbangkan 4 artikel, menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap topik terkait big data dan pemerintahan informasi dari perspektif yang berbeda. Jurnal-jurnal lain seperti "*Bulletin of*

Chinese Academy of Sciences", *"Frontiers in Public Health"*, *"IEEE Internet Computing"*, *"International Journal of Data and Network Science"*, dan *"International Journal of Public Administration"* masing-masing memiliki 3 artikel yang terkait dengan topik penelitian. Distribusi ini memberikan gambaran yang jelas tentang sumber-sumber utama literatur yang dapat dijadikan referensi dalam memahami aspek-aspek tertentu dari topik penelitian yang sedang dijelajahi. Selain itu, analisis ini juga menyoroti keragaman dalam sumber publikasi, yang mencerminkan pendekatan multidisiplin dalam memahami isu-isu kompleks seperti keberlanjutan, pemerintahan informasi, dan big data.

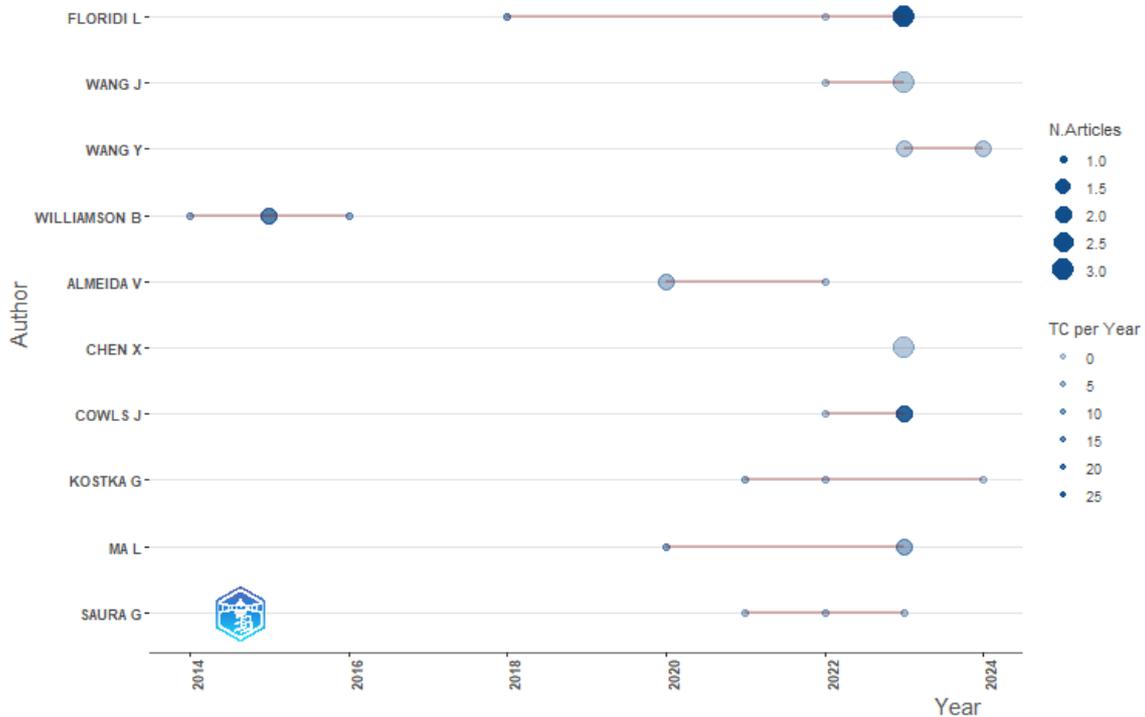


Grafik 3. Sumber Artikel yang Paling Relevan

Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

Kemudian, berkaitan dengan penulis, analisis bibliometrik berdasarkan distribusi penulis dan judul pada grafik 4 menyoroti kontribusi penulis tertentu dan variasi topik yang ditangani dalam literatur terkait dengan pemerintahan digital. Sebagian besar penulis dalam tabel tersebut adalah perusahaan erusah terhadap artikel-artikel mereka, dengan beberapa pengecualian erusa beberapa penulis memiliki lebih dari satu artikel. Floridi L, misalnya, memiliki beberapa artikel dalam rentang tahun yang berdekatan, menyoroti kontribusi signifikan dari penulis ini dalam literatur terkait. Artikel-artikel yang dikontribusikan oleh Floridi L (Cowls, Tsamados, Taddeo, & Floridi, 2023) mengambil berbagai pendekatan, termasuk tinjauan, analisis kebijakan, dan penelitian empiris. Selain itu, penulis lain seperti Nasifuhan, Wang Y dan Wang J (Nasifuhan et al., 2023) juga menonjol dengan beberapa kontribusi pada topik yang berbeda, seperti peran pemerintahan digital dalam kinerja emisi karbon dan transformasi digital perusahaan. Distribusi ini mencerminkan keragaman dalam pendekatan dan topik yang ditangani dalam literatur pemerintahan digital, dari isu etis dan sosial hingga aplikasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data dalam konteks lingkungan, pendidikan, dan pemerintahan lokal. Juga, penulis seperti Cowls J, Ma L, dan Saura G (Cowls et al., 2023) juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya wawasan terkait dengan isu-isu tersebut. Melalui analisis ini, kita dapat melihat keragaman dan

kontribusi penting dari berbagai penulis dalam mengembangkan pemahaman kita tentang *Digital Governance* dalam konteks yang beragam.



Grafik 4. Produksi Artikel oleh Penulis

Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

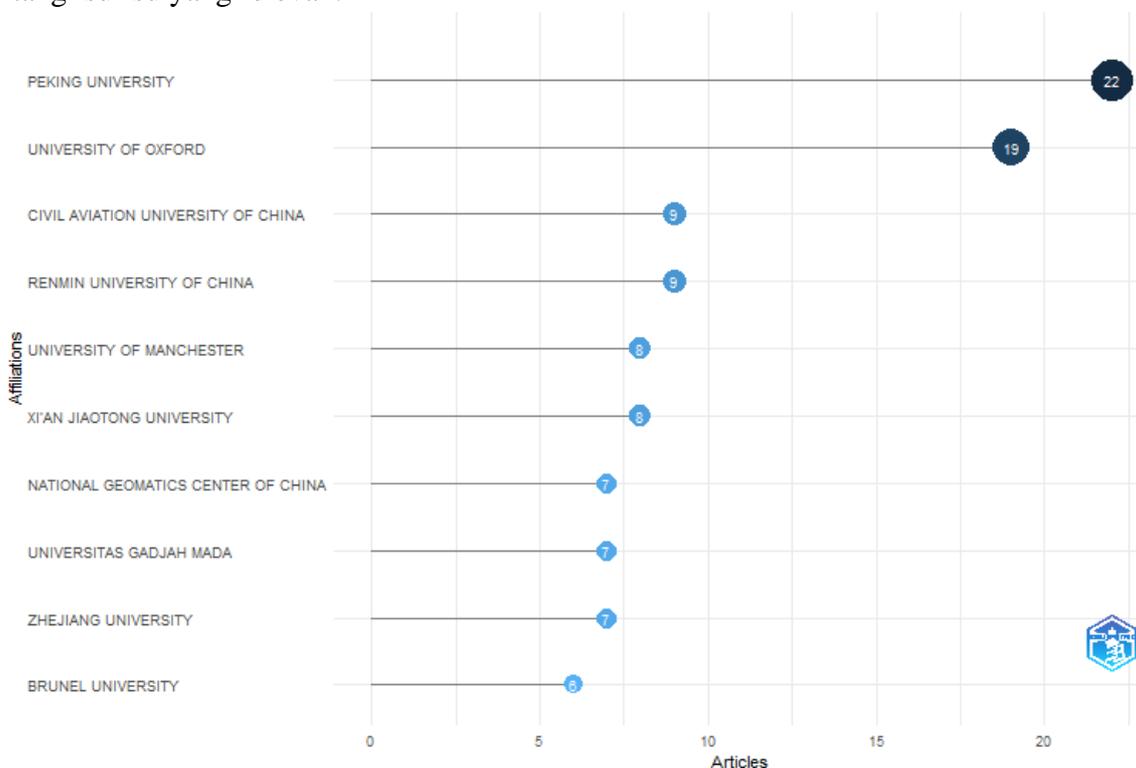
Jurnal *Sustainability* dari MDPI menjadi dominan dalam penerbitan naskah mengenai e-governance karena pendekatan multidisiplinernya yang kuat terhadap isu-isu keberlanjutan, termasuk dalam konteks tata kelola digital. E-governance, yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sangat relevan dengan tema keberlanjutan. Dalam konteks ini, *Sustainability* sering kali menjadi platform pilihan bagi para peneliti yang mengeksplorasi bagaimana e-governance dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan pengurangan korupsi.

Selain itu, jurnal ini juga dikenal karena proses publikasinya yang relatif cepat dan akses terbukanya yang memungkinkan distribusi hasil penelitian yang luas. Ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi peneliti yang ingin mencapai audiens yang lebih besar dengan dampak langsung. Selain *Sustainability*, jurnal *Government Information Quarterly* juga menonjol karena fokus khususnya pada teknologi informasi dalam konteks pemerintahan, yang membuatnya menjadi salah satu sumber utama dalam literatur e-governance. Jurnal *Big Data and Society* menambah dimensi yang berbeda dengan fokusnya pada implikasi sosial dan etis dari penggunaan big data dalam tata kelola pemerintahan, menjadikannya platform penting untuk diskusi mengenai bagaimana data besar dapat diintegrasikan ke dalam praktik e-governance secara bertanggung jawab.

Penulis seperti Luciano Floridi menjadi dominan dalam literatur e-governance karena kontribusi signifikan mereka dalam membentuk diskusi tentang dampak etis dan filosofis dari teknologi digital, termasuk *e-governance*. Floridi sering membahas isu-isu yang berkaitan dengan etika informasi, privasi, dan kebijakan yang harus diadopsi oleh pemerintah dalam era digital. Temuan dari penelitian Floridi menggarisbawahi pentingnya pendekatan etis dalam penerapan teknologi digital di pemerintahan, dan implikasinya mencakup perlunya kerangka kerja kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi hak privasi warga dalam lingkungan yang semakin terdigitalisasi.

Di urutan kedua, Nasifuhan dan kolaboratornya, seperti Wang Y dan Wang J, berkontribusi pada literatur e-governance dengan fokus yang lebih empiris dan aplikatif, seperti analisis dampak kebijakan digital terhadap kinerja emisi karbon dan transformasi digital perusahaan. Meskipun masih dalam kerangka *e-governance*, penelitian mereka sering kali terpusat pada bagaimana implementasi teknologi digital dapat memberikan hasil nyata dalam konteks lingkungan dan bisnis, seperti pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi operasional. Temuan mereka menunjukkan bahwa *e-governance* tidak hanya tentang transparansi dan partisipasi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digital dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan lingkungan dan ekonomi yang lebih luas.

Kemudian berdasarkan pada grafik 5, Analisis bibliometrik berdasarkan afiliasi menyoroti kontribusi berbagai institusi akademis dalam literatur terkait dengan pemerintahan digital. Peking University menonjol sebagai afiliasi dengan jumlah artikel tertinggi, yaitu 22 artikel, menunjukkan peran penting universitas ini dalam penelitian dan pengembangan di bidang tersebut. Disusul oleh University of Oxford dengan 19 artikel, yang juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dari institusi terkemuka ini dalam literatur terkait. Institusi akademis lain seperti Civil Aviation University of China dan Renmin University of China memiliki jumlah artikel yang sama, yaitu 9 artikel, menunjukkan fokus dan minat yang kuat dari institusi-institusi ini dalam topik pemerintahan digital. Universitas lainnya seperti University of Manchester, Xi'an Jiaotong University, dan Zhejiang University juga memiliki kontribusi yang signifikan dengan masing-masing 8 atau 7 artikel. Distribusi ini mencerminkan keragaman afiliasi yang terlibat dalam penelitian pemerintahan digital, baik dari institusi dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa topik ini mendapat perhatian yang luas dari berbagai institusi akademis di seluruh dunia, menciptakan keragaman dalam perspektif dan pendekatan penelitian. Melalui kerja sama dan kolaborasi antar institusi, literatur terkait pemerintahan digital dapat terus berkembang dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu yang relevan.



Grafik 5. Afiliasi yang Paling Relevan
 Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

Perdebatan yang muncul dari dominasi jurnal dan penulis tertentu dalam literatur e-governance mencerminkan perbedaan pendekatan dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, jurnal seperti *Sustainability* dan penulis seperti Floridi lebih menekankan pada dimensi etis dan keberlanjutan dari e-governance, menyoroti kebutuhan akan tata kelola yang bertanggung jawab dan inklusif. Di sisi lain, penulis seperti Nasifuhan fokus pada implikasi praktis dan operasional dari kebijakan digital, seperti dampak lingkungan dan transformasi bisnis.

Kebaruan yang muncul dari analisis ini adalah pengakuan bahwa e-governance bukanlah monolitik, melainkan sebuah bidang yang terdiri dari berbagai sub-dimensi yang saling terkait namun memiliki fokus dan prioritas yang berbeda. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam penelitian e-governance, yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis dan operasional, tetapi juga dimensi etis dan sosial. Penelitian di masa depan harus lebih memperhatikan interaksi antara dimensi-dimensi ini, serta bagaimana mereka dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem pemerintahan digital yang lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai tantangan yang ada.

Analisis Topik dan Tema

Berkaitan dengan analisis topik dan tema, kami menggunakan tiga metode: (1) *World Cloud*, (2) *Three Field Plot*, dan (3) Analisis Tematik yang dihasilkan menggunakan aplikasi Biblioshiny dari R-Studio. Tiga metode ini digunakan untuk menganalisis topik dan tema dalam literatur atau teks. *Word Cloud* adalah representasi visual dari frekuensi kata dalam sebuah teks, di mana kata-kata yang muncul lebih sering ditampilkan lebih besar. Ini memberikan gambaran visual instan tentang kata-kata kunci atau topik yang dominan dalam teks. *Three Field Plot* adalah metode visualisasi yang memungkinkan untuk mengevaluasi dan memahami hubungan antara tiga variabel dalam sebuah dataset. Plot ini menggambarkan seberapa sering dua variabel muncul bersama-sama di sumbu horizontal dan vertikal, sementara frekuensi ketiga variabel direpresentasikan oleh ukuran titik atau intensitas warna. Analisis Tematik, di sisi lain, adalah metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam dataset teks. Analisis ini dilakukan dengan grafik yang terdiri dari dua variabel *Development Degree* dan *Relevance Degree*, memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan konten dari teks, serta memungkinkan identifikasi tema-tema yang mungkin tidak terlihat secara langsung.

Hasil analisis *world cloud* menunjukkan kata "China" muncul paling sering dengan frekuensi 30, menunjukkan pentingnya negara ini dalam konteks yang sedang diteliti. Kata kunci lain yang muncul secara signifikan termasuk "governance approach", "sustainable development", "human", dan "digital governance", masing-masing dengan frekuensi 20, 17, 14, dan 13. Kata kunci ini menggambarkan fokus utama atau topik yang sering muncul dalam literatur yang dianalisis. Selanjutnya, kata-kata seperti "innovation", "smart city", "artificial intelligence", dan "government" juga muncul dengan frekuensi yang cukup tinggi, menunjukkan keragaman topik yang tercakup dalam analisis. Dari *Word Cloud* ini, peneliti dapat dengan cepat mengidentifikasi kata-kata kunci atau topik utama yang mendominasi dalam literatur yang dianalisis, membantu dalam pemahaman awal terhadap fokus dan isu-isu utama yang dibahas dalam teks.

Plot tiga bidang (*Three Field Plot*) yang dihasilkan oleh *Biblioshiny* memungkinkan penilaian visual terhadap hubungan antar sumber, negara, afiliasi, kata kunci, penulis terkemuka, sumber yang dikutip, dan kata kunci penulis (R. Kumar, Singh, Sidhu, & Pruncu, 2021). Alat visualisasi ini meningkatkan pemahaman tentang jaringan dan koneksi dalam lanskap ilmiah. Selain itu, dalam studi kebajikan organisasi, *Biblioshiny*, bersama dengan *VOSviewer*, digunakan untuk bibliometrik dan analisis konten guna menganalisis karakteristik publikasi dan menyajikan hasilnya secara efektif (Goyal, Sharma, & Sharma, 2023).

Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

Hasil analisis *Three Field Plot* pada grafik 7 menunjukkan bahwa isu-isu tentang *Sustainable Development, Governanance Approach, Human, dan Innovation* menjadi topik-topik yang mengitari diskusi tentang *Digital Governance*. Pembangunan Berkelanjutan merupakan aspek penting dalam konteks *Digital Governance* karena menekankan perlunya kemajuan teknologi agar selaras dengan tujuan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pendekatan Tata Kelola menandakan strategi, kebijakan, dan kerangka kerja yang diterapkan untuk mengatur dan mengelola teknologi digital secara efektif. Aspek manusia menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor manusia, seperti kebutuhan, perilaku, dan hak pengguna, dalam desain dan implementasi inisiatif *Digital Governance*. Inovasi memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan transformasi dalam lanskap *Digital Governance*, mendorong penerapan teknologi dan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan yang muncul.

Menonjolnya topik-topik ini dalam *Three Field Plot* menunjukkan bahwa topik-topik tersebut penting dalam diskusi dan penelitian seputar *Digital Governance*. Pembangunan Berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya menciptakan solusi digital yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan Tata Kelola menyoroti pentingnya membangun struktur tata kelola yang kuat untuk memastikan penggunaan teknologi digital yang etis dan efektif. Aspek Manusia menekankan desain yang berpusat pada manusia dan pertimbangan etis dalam praktik *Digital Governance*. Inovasi menunjukkan peran kreativitas dan kemajuan dalam membentuk masa depan *Digital Governance*.

Dengan berfokus pada tema-tema utama ini, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan penting, mendorong inovasi, dan mendorong praktik *Digital Governance* yang berkelanjutan dan inklusif. Analisis *Three Field Plot* memberikan wawasan berharga mengenai keterkaitan topik-topik tersebut dan relevansinya dalam membentuk wacana *Digital Governance*.

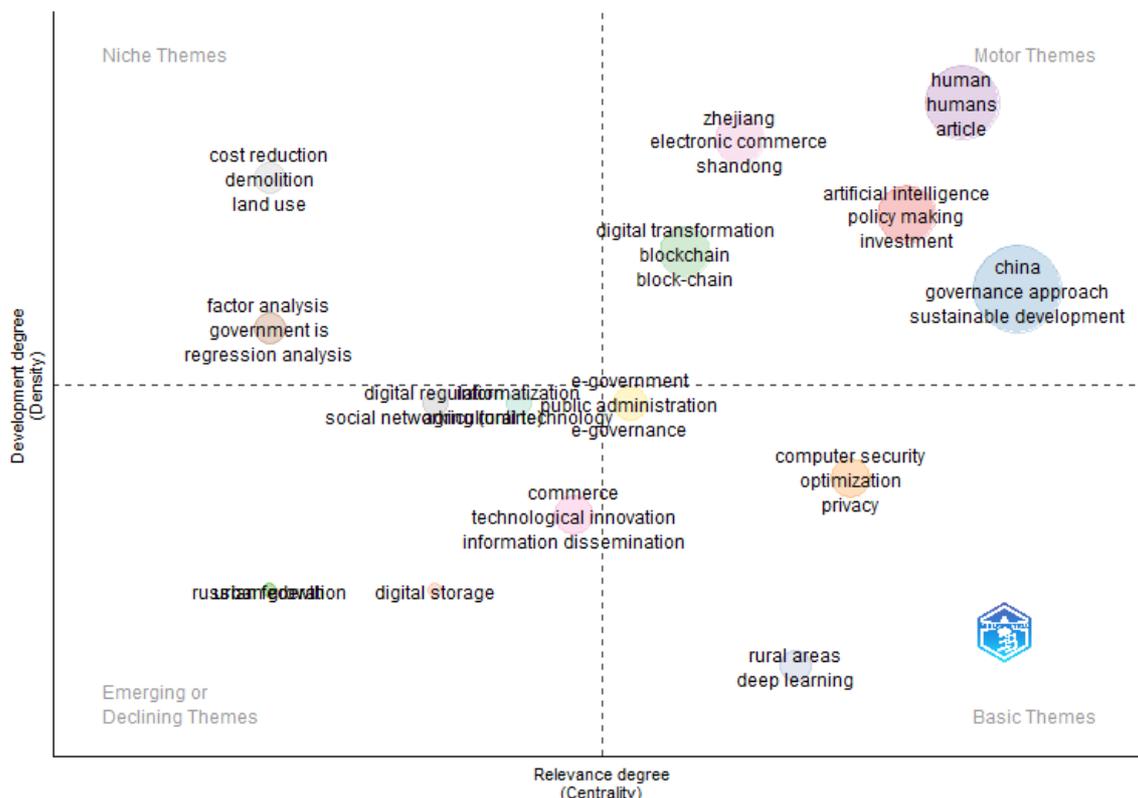
Analisis Tematik Empat Kuadran

Selanjutnya kami melakukan analisis tematik berdasarkan sentralitas dan densitas topik dan/atau tema yang berkaitan dengan *Digital Governance*. Dengan mengintegrasikan dua variabel (*Development Degree dan Relevance Degree*) pada grafik 8, dihasilkan empat kuadran yang terdiri atas: (1) *Motor Themes*, (2) *Basic Themes*, (3) *Emerging or Declining Themes*, dan (4) *Niche Themes*.

Analisis tematik adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Sentralitas mengacu pada pentingnya atau menonjolnya suatu tema dalam data, sedangkan kepadatan berkaitan dengan keterhubungan atau prevalensi suatu tema. Tingkat Perkembangan kemungkinan menunjukkan tingkat kemajuan atau kematangan suatu tema, sedangkan Tingkat Relevansi menunjukkan seberapa relevan atau dapat diterapkannya suatu tema dalam konteks *Digital Governance*.

Kategorisasi ke dalam empat kuadran memberikan cara terstruktur untuk memahami lanskap tema dalam analisis. Tema Motor cenderung bersifat sentral, padat, sangat berkembang, dan relevan, yang menandakan bidang-bidang utama yang mendorong wacana *Digital Governance*. Tema Dasar mungkin mendasar tetapi tidak sepenting atau berkembang seperti Tema Motorik. Tema yang Muncul atau Menurun dapat mewakili topik yang menjadi penting atau tidak lagi penting dalam bidang tersebut. Tema Niche cenderung terspesialisasi, kurang lazim, namun berpotensi berdampak dalam konteks tertentu. *Niche Themes* dan *Emerging Themes* kemudian menjadi pertimbangan kami dalam melahirkan *Novelty* untuk kajian mengenai *Digital Governance*.

Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda mengenai lanskap tematik seputar *Digital Governance*, sehingga memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi bidang-bidang fokus utama, melacak tren dalam pengembangan dan relevansi tema, dan mengenali bidang-bidang khusus yang mungkin memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan sentralitas dan kepadatan serta tingkat perkembangan dan relevansinya, para peneliti dapat memperoleh wawasan tentang dinamika dan signifikansi berbagai tema dalam domain *Digital Governance*.



Grafik 8. Analisis Tematik berdasarkan Derajat Pengembangan (*Density*) dan Derajat Relevansi (*Centrality*)

Sumber: Hasil Analisis Bibliometrik tentang 'Digital Governance'

Berdasarkan grafik 8, topik mengenai *Rural Areas*, *Urban Growth*, *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation* merupakan topik yang memiliki korelasi kuat antara nilai Derajat Pengembangan (*Density*) dan Derajat Relevansi (*Centrality*). Pada kuadran *Niche Themes*, terlihat bahwa kajian-kajian mengenai *Cost Reduction* dan *Land Use* menempati posisi sebagai tema ceruk yang saat ini cukup pesat berkembang namun tidak terlalu sebangun dengan tema-tema dasar dan motor dari *Digital Governance*. Sedangkan tema-tema seperti *Rural Areas*, *Deep Learning*, dan *Computer Security* masuk dalam kategori Tema Dasar. Kemudian, tema Manusia, *Artificial Intelligence*, *Policy Making*, *Investment*, dan *Digital Transformation* masuk dalam kategori Tema Motor/Penggerak. Terakhir, tema *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation* berada pada kuadran/kategori Tema *Emerging* dimana produksi artikel berkaitan dengan tema tersebut tidak banyak karena tergolong baru.

Berdasarkan grafik 8, dapat disimpulkan bahwa beberapa topik, seperti *Rural Areas*, *Urban Growth*, *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation*, menunjukkan korelasi yang kuat antara nilai Derajat Pengembangan (*Density*) dan Derajat Relevansi (*Centrality*). Hal ini menandakan bahwa topik-topik ini tidak hanya secara luas dibahas dalam literatur, tetapi juga dianggap penting dan relevan dalam konteks *Digital Governance*. Di sisi lain, kuadran

Niche Themes menunjukkan bahwa kajian-kajian tentang *Cost Reduction* dan *Land Use* berkembang pesat saat ini, meskipun mereka tidak sebangun dengan tema-tema dasar dan motor dari *Digital Governance*. *Rural Areas*, *Deep Learning*, dan *Computer Security* termasuk dalam kategori Tema Dasar, menunjukkan pentingnya topik ini dalam pembentukan landasan pemahaman tentang *Digital Governance*. Sementara itu, tema-tema seperti Manusia, *Artificial Intelligence*, *Policy Making*, *Investment*, dan *Digital Transformation* masuk dalam kategori Tema Motor/Penggerak, menunjukkan bahwa mereka memiliki peran kunci dalam mendorong perkembangan dan implementasi *Digital Governance*. Terakhir, tema *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation* ditempatkan dalam kuadran/kategori Tema Emerging, menandakan bahwa meskipun produksi artikel yang berkaitan dengan tema tersebut masih terbatas, mereka memiliki potensi untuk menjadi lebih signifikan seiring dengan waktu karena status mereka yang baru dalam domain *Digital Governance*.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, terdapat beberapa tema yang memiliki potensi untuk menjadi kajian yang baru dan inovatif dalam konteks *Digital Governance*. Pertama, tema *Cost Reduction* dan *Land Use*, meskipun saat ini sedang berkembang pesat, masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan tema-tema dasar *Digital Governance*. Penelitian lebih lanjut dalam hal ini dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi strategi pengurangan biaya dapat dioptimalkan dalam konteks pemerintahan digital, serta bagaimana penggunaan lahan yang efisien dapat mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka *Digital Governance*.

Selanjutnya, tema *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation*, yang termasuk dalam kategori Tema *Emerging*, menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk penelitian baru dan inovatif dalam domain ini. Studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana penyimpanan digital dan regulasi yang terkait dapat membentuk dan memengaruhi praktik pemerintahan digital, terutama dengan pertumbuhan perdagangan elektronik dan peraturan baru yang berkembang dalam era digital.

Selain itu, tema *Rural Areas*, *Urban Growth*, dan *Computer Security* juga memiliki potensi untuk kajian yang inovatif. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan dan mengelola pertumbuhan perkotaan secara berkelanjutan. Selain itu, studi tentang keamanan komputer dalam konteks *Digital Governance* dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan solusi dalam melindungi data dan infrastruktur digital dari ancaman keamanan.

Secara keseluruhan, kajian potensial yang dapat dieksplorasi lebih lanjut adalah bagaimana integrasi dan penerapan tema-tema yang sedang berkembang, seperti pengurangan biaya, perdagangan elektronik, dan penyimpanan digital, dapat memperkaya dan memperkuat landasan teoritis dan praktis dari *Digital Governance*. Dengan penelitian yang lebih mendalam dalam tema-tema ini, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Diskusi

Dalam lima tahun terakhir terkait dengan studi tentang *Digital Governance*, perdebatan akademik mengenai etika dan privasi data, partisipasi warga, kesenjangan digital, serta AI dan automasi dalam pengambilan keputusan menjadi semakin relevan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam era digital yang terus berkembang, di mana teknologi berperan penting dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Pertama, etika dan privasi data menjadi topik yang sangat penting dalam konteks digital governance. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, terutama media sosial, muncul kekhawatiran mengenai bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Penelitian

menunjukkan bahwa media sosial dapat meningkatkan transparansi pemerintah dan partisipasi warga, tetapi juga menimbulkan risiko privasi yang signifikan (Rahmanto, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang memastikan bahwa penggunaan data dilakukan secara etis dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak individu (Prabowo, 2023). Selanjutnya, partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik telah mengalami transformasi dengan adanya teknologi digital. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan demokrasi dan penggunaan media digital (Elizamiharti, 2023; Prabowo, 2023). Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, partisipasi warga dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang proses politik dan hak-hak mereka sebagai pemilih (Iskandar, 2023). Selain itu, partisipasi warga dalam menangani isu-isu lokal, seperti penanganan sampah plastik, menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif (Dieningrum, Muslihudin, & Suyanto, 2020).

Kesenjangan digital juga menjadi perhatian utama dalam diskusi mengenai digital governance. Kesenjangan ini tidak hanya mencakup akses terhadap teknologi, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital dan proses pengambilan keputusan (Mahpudin, 2020). Kesenjangan ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial jika tidak ditangani dengan baik, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Terakhir, AI dan automasi dalam pengambilan keputusan menawarkan peluang dan tantangan baru. Penggunaan sistem pendukung keputusan berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis mengenai transparansi dan akuntabilitas (Saimo, 2022; Silalahi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi ini, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan algoritma, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika (Elizamiharti, 2023).

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai etika dan privasi data, partisipasi warga, kesenjangan digital, serta AI dan automasi dalam pengambilan keputusan mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam era digital. Diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan aspek etika dan keadilan.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam baru mengenai perkembangan dan dinamika studi Digital Governance selama hampir dua dekade terakhir selain dari pada sejumlah aspek yang telah disampaikan sebelumnya. Melalui analisis bibliometrik terhadap 340 artikel yang dipublikasikan antara tahun 2006 hingga Maret 2024, penelitian ini mengidentifikasi tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah publikasi, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2023. Hal ini menegaskan bahwa Digital Governance telah menjadi topik yang semakin penting dalam wacana akademik dan praktik pemerintahan modern, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan inovasi dalam tata kelola yang didorong oleh kemajuan teknologi digital.

Lebih jauh, analisis sitasi mengungkapkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah publikasi, artikel-artikel yang diterbitkan pada periode 2013 hingga 2017 memiliki dampak sitasi yang lebih besar, menunjukkan relevansi dan pengaruh teoretis yang signifikan dari karya-karya yang dihasilkan pada periode tersebut. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa meskipun volume penelitian meningkat, hanya sebagian kecil artikel yang berhasil memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan teori dan praktik dalam bidang ini.

Dari perspektif tematik, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tema utama yang mendominasi literatur Digital Governance, seperti Pembangunan Berkelanjutan, Pendekatan

Tata Kelola, Inovasi, dan Aspek Manusia. Tema-tema ini tidak hanya memiliki densitas yang tinggi dalam jaringan penelitian, tetapi juga menunjukkan sentralitas yang kuat, mengindikasikan peran kritis mereka dalam membentuk wacana dan arah penelitian di bidang ini. Keberadaan tema-tema ini dalam peta tematik menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dan berkelanjutan dalam penerapan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan global dan inklusivitas sosial.

Namun demikian, analisis ini juga mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, terutama terkait dengan integrasi tema-tema seperti *Cost Reduction* dan *Land Use* ke dalam kerangka kerja *Digital Governance* yang lebih luas. Tema-tema ini, meskipun menunjukkan perkembangan yang signifikan, masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan tema-tema dasar seperti Transformasi Digital dan Kebijakan Publik. Kesenjangan ini menandakan perlunya penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen ini dapat diintegrasikan lebih baik dalam konteks *Digital Governance*, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan aplikatif dalam praktik pemerintahan digital.

Selain itu, temuan-temuan terkait dengan tema-tema yang sedang berkembang seperti *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation* menunjukkan adanya potensi besar untuk eksplorasi penelitian lebih lanjut. Meskipun tema-tema ini masih berada pada tahap awal pengembangan, mereka menawarkan jalur baru untuk inovasi dalam pengelolaan data dan regulasi digital yang semakin kompleks di era ekonomi digital. Mengingat relevansi yang terus meningkat dari tema-tema ini, penelitian di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan teoritis dan aplikatif dari *Digital Governance*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya terus mengembangkan kajian tentang *Digital Governance*, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data ke dalam sistem pemerintahan, serta peningkatan partisipasi publik melalui platform digital, merupakan area yang sangat menjanjikan untuk penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan panduan untuk arah penelitian masa depan tetapi juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif dalam mengembangkan tata kelola digital yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Analisis bibliometrik yang dipergunakan dalam artikel ini tentang “*Digital Governance*” yang bersumber database Scopus selama delapan belas tahun terakhir sangat dinamis dan berkembang. Sebanyak 340 artikel jurnal yang telah terbit sepanjang tahun 2006 sampai dengan bulan maret 2024. Adapun dalam penelitian ini ditemukan tren penelitian yang terpublikasi terbanyak dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 103 artikel dengan sitasi pada tahun 2015 sebanyak 6 sitasi. Kemudian yang menduduki peringkat kedua adalah tahun 2017 sebanyak 5 sitasi dan yang ketiga adalah pada tahun 2018 sebanyak 4 sitasi.

Penelitian tentang *Digital Governance* memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk tata kelola pemerintahan. Berbagai bidang yang dapat dieksplorasi dalam penelitian ini meliputi keamanan *cyber*, integrasi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan komputasi awan ke dalam sistem pemerintahan, pemanfaatan big data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi publik dan transparansi pemerintahan melalui platform digital. Selain itu, penelitian tentang etika digital, pengembangan kapasitas, pengukuran kinerja, kolaborasi antarwilayah, kewirausahaan digital, dan resiliensi digital juga menjadi fokus yang penting.

Dengan terus menjelajahi dan mengembangkan bidang-bidang ini, penelitian *Digital Governance* dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Berkaitan dengan perkembangan literatur keilmuan, analisis tematik telah dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara sentralitas, densitas, serta tingkat perkembangan dan relevansi tema dalam *Digital Governance*. Dengan mengintegrasikan variabel *Development Degree* dan *Relevance Degree*, empat kuadran terbentuk, mencakup *Motor Themes*, *Basic Themes*, *Emerging or Declining Themes*, dan *Niche Themes*. Pendekatan ini memberikan cara terstruktur untuk memahami lanskap tema dalam analisis, memungkinkan pengidentifikasian bidang fokus utama, tren pengembangan, serta temuan khusus yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Tema-tema seperti *Rural Areas*, *Urban Growth*, *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation* menunjukkan korelasi yang kuat antara densitas dan sentralitas, menandakan pentingnya dan relevansinya dalam *Digital Governance*. Di sisi lain, kajian mengenai *Cost Reduction* dan *Land Use*, meskipun berkembang pesat, masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan tema-tema dasar. Tema-tema lain seperti *Computer Security*, *Artificial Intelligence*, dan *Digital Transformation* masuk dalam kategori *Motor Themes*, menunjukkan peran kunci dalam mendorong perkembangan *Digital Governance*. Selain itu, tema-tema *Emerging* seperti *Digital Storage*, *Commerce*, dan *Digital Regulation* menjanjikan penelitian baru dan inovatif di masa depan. Studi lebih lanjut dalam tema-tema ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana teknologi digital dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Adapun dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan sumber database yang dipergunakan hanya dari database scopus saja sehingga diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan database tambahan seperti google scholar, serta dapat dilakukan perbandingan "*digital governance*" dari berbagai negara lainnya

Ke depan, penelitian di bidang *Digital Governance* memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Beberapa area yang menjanjikan untuk dieksplorasi lebih lanjut mencakup integrasi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan komputasi awan ke dalam sistem pemerintahan. Pemanfaatan big data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta peningkatan partisipasi publik dan transparansi pemerintahan melalui platform digital, juga merupakan area yang sangat potensial.

Selain itu, etika digital, pengembangan kapasitas, dan pengukuran kinerja dalam konteks *Digital Governance* menjadi fokus penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etis dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan digital, serta bagaimana kolaborasi antarwilayah dan kewirausahaan digital dapat diperkuat untuk menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Lebih jauh lagi, studi tentang resiliensi digital menjadi semakin relevan di tengah tantangan global seperti pandemi dan perubahan iklim. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan sistem pemerintahan terhadap gangguan eksternal, sekaligus memastikan bahwa manfaat dari *Digital Governance* dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menjelajahi dan mengembangkan bidang-bidang ini, penelitian *Digital Governance* tidak hanya akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan responsif, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretis yang lebih kuat dan praktik yang lebih baik dalam menghadapi tantangan tata kelola di era digital.

REFERENSI

- Addo, A., & Senyo, P. K. (2020). Digitalization and Government Corruption in Developing Countries: Towards a Framework and Research Agenda. *Academy of Management Proceedings*, 2020(1), 16765. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2020.16765abstract>
- Alvarenga, A. M., Matos, F., Godina, R., & Matias, J. C. O. (2020). Digital Transformation and Knowledge Management in the Public Sector. *Sustainability*, 12(14), 5824. <https://doi.org/10.3390/su12145824>
- Ananda, R. K., & Nandiyanto, A. B. D. (2022). Bibliometric Analysis of Publication on Protein Nanoparticle Using VOSviewer. *Jurnal Kedokteran Diponegoro (Diponegoro Medical Journal)*, 11(6). <https://doi.org/10.14710/dmj.v11i6.35942>
- Baier-Fuentes, H., Merigó, J. M., Amorós, J. E., & Gaviria-Marín, M. (2018). International Entrepreneurship: A Bibliometric Overview. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 15(2), 385–429. <https://doi.org/10.1007/s11365-017-0487-y>
- Belanger, F., & Carter, L. (2012). Digitizing Government Interactions With Constituents: An Historical Review of E-Government Research in Information Systems. *Journal of the Association for Information Systems*, 13(5), 363–394. <https://doi.org/10.17705/1jais.00295>
- Boğa-Avram, C. (2024). Examining the White and Dark Sides of Digitalisation Effects on Corruption: Unveiling Research Patterns and Insights for Future Research. *The Journal of Risk Finance*, 25(2), 181–223. <https://doi.org/10.1108/jrf-10-2023-0256>
- Chen, H. (2023). When Text Mining Meets Science Mapping in the Bibliometric Analysis: A Review and Future Opportunities. *International Journal of Engineering Business Management*, 15. <https://doi.org/10.1177/18479790231222349>
- Cowls, J., Tsamados, A., Taddeo, M., & Floridi, L. (2023). The AI gambit: leveraging artificial intelligence to combat climate change—opportunities, challenges, and recommendations. *AI & SOCIETY*, 38(1), 283–307. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01294-x>
- Demuyakor, J. (2021). Ghana's Digitization Initiatives: A Survey of Citizens Perceptions on the Benefits and Challenges to the Utilization of Digital Governance Services. *International Journal of Publication and Social Studies*, 6(1), 42–55. <https://doi.org/10.18488/journal.135.2021.61.42.55>
- Dieningrum, A. N. A., Muslihudin, M., & Suyanto, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Paving Block Di “Ud. Wong Cilik” Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.44430>
- Elizamiharti, E. (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *J. Ris. Multidisip. Inov. Tech.*, 2(01), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- García-Sánchez, I., Rodríguez-Domínguez, L., & Frías-Aceituno, J.-V. (2013). Evolutions in E-governance: Evidence From Spanish Local Governments. *Environmental Policy and Governance*. <https://doi.org/10.1002/eet.1622>
- Goyal, R., Sharma, H., & Sharma, A. (2023). A thorough examination of organizations from an ethical viewpoint: A bibliometric and content analysis of organizational virtuousness studies. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 33(1), 129–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/beer.12597>
- Hasanah, S., Pratama, I. N., Rahmat, A. F., & Kurniawan, C. (2023). Digital Government in Social Sciences Discipline: Mapping Pivotal Features and Proposed Theoretical Model. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 195. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.819>
- Herdianto, R., Windyaningrum, N., Masruroh, B., & Setiawan, M. A. (2021). Filsafat Pendidikan Dan Perkembangannya: Kajian Bibliometrik Berdasarkan Database Scopus.

- Belantika Pendidikan*. <https://doi.org/10.47213/bp.v4i2.101>
- Iskandar, A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Pemilih Pemula Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Sman 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 7(1), 47–54. <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.5137>
- Kammerer, K., Göster, M., Reichert, M., & Pryss, R. (2021). Ambalytics: A Scalable and Distributed System Architecture Concept for Bibliometric Network Analyses. *Future Internet*, 13(8), 203. <https://doi.org/10.3390/fi13080203>
- Kawuki, J., Yu, X., & Musa, T. H. (2020). Bibliometric Analysis of Ebola Research Indexed in Web of Science and Scopus (2010-2020). *Biomed Research International*, 2020, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2020/5476567>
- Kumar, R., Singh, S., Sidhu, A. S., & Pruncu, C. I. (2021). Bibliometric Analysis of Specific Energy Consumption (SEC) in Machining Operations: A Sustainable Response. *Sustainability*, 13(10), 5617. <https://doi.org/10.3390/su13105617>
- Kumar, S., Sureka, R., & Pandey, N. (2020). Forty-Five Years of *the International Journal of Social Economics (IJSE)*: A Bibliometric Overview. *International Journal of Social Economics*, 47(7), 831–849. <https://doi.org/10.1108/ijse-08-2019-0492>
- Larivière, V., Ni, C., Gingras, Y., Cronin, B., & Sugimoto, C. R. (2013). Bibliometrics: Global Gender Disparities in Science. *Nature*, 504(7479), 211–213. <https://doi.org/10.1038/504211a>
- Lember, V. (2022). *Engaging Citizens in Policy Making: The Potential and Challenges of E-Participation*. <https://doi.org/10.4337/9781800374362.00006>
- Liu, F. (2022). A Bibliometric Study of Digital Government in Domestic and Foreign Area. *Frontiers in Business Economics and Management*, 5(3), 222–226. <https://doi.org/10.54097/fbem.v5i3.2024>
- Magnusson, J., Khisro, J., Björnses, M., & Ivarsson, A. (2020). Closeness and Distance: Configurational Practices for Digital Ambidexterity in the Public Sector. *Transforming Government People Process and Policy*, 15(4), 420–441. <https://doi.org/10.1108/tg-02-2020-0030>
- Mahpudin, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy Dan Implikasinya Terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat Yang Tersisih. *Politicon Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 113–128. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.9035>
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The Second Wave of Digital-Era Governance: A Quasi-Paradigm for Government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society a Mathematical Physical and Engineering Sciences*, 371(1987), 20120382. <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *Malia (Terakreditasi)*. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- Nasifuhan, D., Yang, R., Wang, Y., Guo, Y., Chen, R., Yeerjiang, Y., ... Yao, B. (2023). Research on the Current Situation, Influencing Factors and Governance Countermeasures of Public Participation in Citizen Post Station Co-Production under the Background of “Internet + IoT”: an Example of Urban Post Station of Environmental Governance. *Polish Journal of Environmental Studies*, 33(1), 303–311. <https://doi.org/10.15244/pjoes/171653>
- Osifo, O. C. (2018). Examining digital government and public service provision: The case of Finland. *2018 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*, 1342–1347. <https://doi.org/10.23919/MIPRO.2018.8400242>
- Prabowo, N. (2023). Urgensi Pendidikan Demokrasi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Edu Society Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 865–871. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.311>

- Rahayuningtyas, D., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rahmanto, A. (2022). Media Sosial Dan Persepsi Publik Tentang Good Governance Pada Pemerintah Daerah Di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433>
- Saimo. (2022). Manajemen Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(4), 220–229. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i4.609>
- Shenkoya, T. (2022). Can Digital Transformation Improve Transparency and Accountability of Public Governance in Nigeria? *Transforming Government People Process and Policy*, 17(1), 54–71. <https://doi.org/10.1108/tg-08-2022-0115>
- Silalahi, O. N. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Pupuk Menggunakan Metode Maut. *Jurnal Sistem Informasi Triguna Dharma (Jursi Tgd)*, 2(3), 394. <https://doi.org/10.53513/jursi.v2i3.6260>
- Urbanovics, A., & Sasvári, P. L. (2022). The Status of E-Government Research From a Bibliometric Aspect. *Central and Eastern European Edem and Egov Days*, 341, 75–88. <https://doi.org/10.24989/ocg.v341.5>
- Viale, T., Gendron, Y., & Suddaby, R. (2017). From “Mad Men” to “Math Men.” *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 30(2), 270–305. <https://doi.org/10.1108/aaaj-12-2014-1887>
- Xue, J., Reniers, G., Li, J., Yang, M., Wu, C., & Gelder, P. v. (2021). A Bibliometric and Visualized Overview for the Evolution of Process Safety and Environmental Protection. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 5985. <https://doi.org/10.3390/ijerph18115985>

Cara Kutip Artikel Ini:

Pratama, R., & Setiawan, A. (2024). ANALISIS BIBLIOMETRIK PERKEMBANGAN PENELITIAN DIGITAL GOVERNANCE. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(2), 306 - 328. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6401>